

RT ZONA MERAH BERHASIL DIANTISIPASI

Yogya Fokus Turunkan Penularan Kasus Covid-19

YOGYA (KR) - Selama lebih dari 1,5 bulan Kota Yogya menjalankan kebijakan PPKM darurat maupun level 4. Selama perpanjangan hingga 23 Agustus, penurunan potensi penularan Covid-19 menjadi fokus penekanan.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, berharap jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 bisa semakin berkurang. "Saat ini masih ada sekitar 1.300 pasien terkonfirmasi positif yang ditangani. Memang sudah turun tetapi angka ini masih tinggi. Kami berkeinginan agar penularan benar-benar bisa ditekan," harapnya, Jumat (20/8).

Menurutnya, kenaikan kasus Covid-19 di Kota Yogya pada tahun ini terjadi pada Juni dengan 350 pasien yang ditangani. Jumlah tersebut mengalami kenaikan hingga sekitar 5.000 kasus pada Juli dan Agustus. Kendati kini sudah berkurang, namun jika semua orang abai maka kasus bisa berpotensi naik lebih banyak lagi. Heroe mencontohkan pada Juli tahun lalu jumlah kasus Covid-19 yang ditangani di Kota Yogya hanya 35 orang. Tetapi jumlah tersebut naik 20 kali lipat pada

Agustus hingga Oktober akibat banyaknya libur panjang dan warga yang abai dengan protokol kesehatan.

Salah satu upaya untuk menekan potensi penularan, lanjutnya, adalah meminta warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 untuk menjalani perawatan di shelter isolasi dari pada menjalani isolasi mandiri di rumah. Dengan menjalani perawatan di shelter, maka akan mengurangi potensi penularan ke anggota keluarga. "Jika kondisi pasien menurun maka dapat segera ditangani karena di tiap shelter ada dokter yang bertugas serta disediakan ambulans," katanya.

Berdasarkan penghitungan, saat ini RT di Kota Yogya yang masuk kategori zona hijau berjumlah sekitar 76 persen. Kondisinya jauh berbeda jika dibandingkan dua bulan lalu atau pada Juni yang bisa mencapai 95 persen. Kendati demikian, RT yang masuk kategori

zona merah saat ini sudah berhasil diantisipasi. Sehingga tidak ada satupun RT yang menyandang zona merah, melainkan kuning dan oranye. "Makanya pengetatan mobilitas di tingkat terbawah tetap penting dilakukan untuk menekan potensi penularan," imbuhnya.

Upaya percepatan penanganan Covid-19 juga dilakukan dengan meningkatkan capaian vaksinasi di Kota Yogya. Jika sebelumnya kapasitas vaksinasi reguler adalah 2.300 dosis per hari, maka saat ini diupayakan dapat ditingkatkan menjadi 6.500 dosis per hari. Pemkot membuka tiga sentra vaksinasi yaitu di XT-Square, PDAM Tirtamarta, dan Ngabean.

Selain itu Kota Yogya juga mendapat tambahan 25 tenaga kesehatan dari TNI yang semula bertugas di Wisma Atlet. Kemudian ada tambahan 30 dokter internship yang diharapkan dapat membantu percepatan vaksinasi. "Ada juga mobil vaksinasi dari Pemkot yang akan segera dioperasikan untuk menguatkan operasional mobil vaksinasi dari kepolisian dan TNI," tandasnya. (Dhi)-f

DISIAPKAN DUA KAWASAN RELOKASI

Usai Revitalisasi, Jalan Sudirman Bebas PKL

YOGYA (KR) - Revitalisasi trotoar di Jalan Jenderal Sudirman tahap akhir sudah memasuki pekerjaan fisik. Usai revitalisasi kawasan Jalan Jenderal Sudirman dipastikan bebas dari aktivitas pedagang kaki lima (PKL).

Revitalisasi trotoar tahap terakhir di Jalan Jenderal Sudirman tersebut menyasar simpang Galeria ke barat hingga simpang Gramedia. "Sesuai komitmen awal, kawasan itu setelahnya nanti tidak ada lagi PKL. Kami sebagai pengampu wilayah sudah melakukan pendekatan. Sosialisasi bersama tokoh masyarakat juga masih berjalan. Bahkan besok Selasa (24/8) sosialisasi lagi," jelas Mantri Gondokusuman Guritno, Minggu (22/8).

Total ada puluhan PKL yang berada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman kawasan Rumah Sakit Bethesda. Terdapat dua kawasan relokasi yang disiap-

kan yakni Jalan Sam Ratulangi dan Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo. Namun demikian tidak semuanya mampu tertampung karena keterbatasan lokasi.

Guritno menyebut, pihaknya lebih fokus menata PKL di Jalan Sam Ratulangi. Sedangkan yang di depan Rumah Sakit Bethesda dikoordinasikan dengan Paguyuban Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (PPKLY). "Kalau yang masuk di Jalan Sam Ratulangi nanti ada sepuluh PKL, sehingga total di sana mencapai sekitar 20 PKL dengan yang sudah ada saat ini," urainya.

Di samping itu, pihaknya menerapkan aturan yang cukup ketat dalam proses penataan PKL. Terutama di Jalan Sam Ratulangi karena kawasan tersebut sudah cukup tertata dan strategis. Hal ini karena Jalan Sam Ratulangi merupakan salah satu pintu masuk ke kawasan pendidikan yakni SMAN 9 Yogya maupun

jalan menuju kawasan yang terdapat banyak bangunan cagar budaya.

Aturan tersebut salah satunya menyangkut aspek kebersihan. Khususnya persoalan sampah yang tidak boleh ditinggalkan usai aktivitas perdagangan. Selain itu jual beli lapak secara tegas akan dilarang. "Misal sudah disediakan ruang di sana namun tidak mau memanfaatkan ya akan kami kosongkan. Tidak boleh terjadi pindah tangan. Ini akan kami tegaskan melalui pernyataan," tandasnya.

Sementara proses pekerjaan revitalisasi saat ini sudah diawali dengan pembongkaran trotoar. Bahkan Jalan Sam Ratulangi sudah dilakukan penataan lebih awal dengan pembuatan saluran limbah. Sesuai kontrak, pekerjaan fisik mencapai 150 hari sehingga akhir tahun sudah harus terselesaikan 100 persen. (Dhi)-f

Bank BPD DIY Adakan Vaksinasi Massal



KR-Devid Permata

Haryadi Suyuti didampingi Santoso Rohmad meninjau vaksinasi massal di Kantor Pusat Bank BPD DIY.

YOGYA (KR) - Bank BPD DIY bekerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta didukung tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan, TNI dan Polri menggelar vaksinasi massal di Kantor Pusat Bank BPD DIY, Jalan Tentara Pelajar No 7 Yogyakarta, 21-22 Agustus 2021. Vaksinasi massal selama dua hari itu menyediakan kuota 2.000 dosis vaksin AstraZeneca untuk warga Yogyakarta, khususnya yang tinggal di sekitar lingkungan Kantor Pusat Bank BPD DIY.

"Hari ini (Sabtu), 1.000 dosis kita selesaikan dan Minggu, 1.000 dosis lagi," terang Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad kepada wartawan disela pelaksanaan vaksinasi, Sabtu (21/8). Turut meninjau langsung jalannya vaksinasi Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Santoso mengingatkan kembali pentingnya vaksinasi, sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi pandemi Covid-19, di samping tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, dia mengajak masyarakat untuk ikut sukseskan program vaksinasi dari pemerintah, dengan cara mau divaksin.

"Bisa kita lihat antusiasme masyarakat sangat tinggi mengikuti vaksinasi ini, dan mereka tertib. Mudah-mudahan segera terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity) di Kota Yogyakarta sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan normal dan perekonomian bisa bangkit kembali," ujarnya.

Walikota Haryadi Suyuti memberikan apresiasi kepada Bank BPD DIY yang telah menggelar vaksinasi massal ini. Haryadi berpesan kepada Dirut Bank BPD DIY agar vaksinasi massal serupa juga diselenggarakan di cabang-cabang Bank BPD DIY untuk percepatan vaksinasi.

Menurut Haryadi, hingga saat ini sudah 40 persen warga Kota Yogyakarta (yang wajib vaksin) telah divaksin. Dengan terus melakukan upaya percepatan-percepatan vaksinasi, diharapkan pada pertengahan September ini seluruh warga Kota Yogyakarta yang wajib vaksin setidaknya sudah mendapat suntikan dosis pertama. "Dengan demikian, pada akhir Desember seluruh warga Kota Yogyakarta sudah mendapat suntikan dosis lengkap," katanya. (Dev)-f

MUNCUL DATA PENERIMA SUSULAN

Pencairan BST APBD Kembali Disesuaikan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya harus menyesuaikan kembali rencana pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dibiayai melalui APBD Kota Yogya. Hal ini lantaran muncul data penerima program serupa dari Kementerian Sosial.

Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Sutini Sri Lestari, menegaskan dari aspek administrasi sebenarnya sudah tidak ada persoalan untuk segera mencairkan. Akan tetapi seiring dengan adanya data susulan baru dari Kementerian Sosial maka pihaknya harus melakukan penyesuaian. "Sebenarnya sudah diproses namun karena kondisi ada susulan dari pusat, data BST APBD Kota Yogya harus disesuaikan lagi," jelasnya, Minggu (22/8).

Penyesuaian harus dilakukan supaya tidak ada data penerima yang double atau ganda. Hal ini karena BST APBD dialokasikan bagi Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) atau pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) namun tidak memperoleh BST dari pusat. Oleh karena itu

jika dalam data susulan terdapat pemegang KMS, maka data sebagai penerima BST APBD Kota Yogya harus dihapus dan dituangkan dalam berita acara.

Sutini menyebut, data susulan penerima BST dari Kementerian Sosial baru diterimanya pada Jumat (20/8) lalu. Totalnya mencapai 314 penerima manfaat. Seluruh data susulan itu kemudian dibandingkan dengan calon penerima BST APBD Kota Yogya. "Makanya kalau ada yang masuk dalam data penerima susulan dari Kementerian Sosial harus kami hapus datanya yang di BST APBD Kota Yogya," imbuhnya.

Sementara jumlah pemegang KMS tahun ini mencapai 15.584 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut sebagian besar sudah masuk dalam program bantuan dari pemerintah pusat baik Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) maupun BST APBN. Sedangkan yang sama sekali belum mendapatkan intervensi mencapai sekitar 2.000 KK untuk diajukan dalam BST APBD Kota Yogya. (Dhi)-f

KSBSI Tolak Perpanjangan PPKM

YOGYA (KR) - Sebagai kelanjutan aksi penolakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DIY telah melakukan audiensi ke Pemda DIY secara virtual.

"Kami prihatin kondisi ekonomi saat PPKM yang semakin terpuruk. Bila PPKM diperpanjang kami siap mengerahkan masa untuk aksi lanjutan," tegas Ketua Serikat Buruh KSBSI DIY Dani Eko Wiyono ST MT kepada KR, Minggu (22/8).

Disebutkan dalam audiensi virtual di Sekretariat Daerah (Sekda) Pemda DIY pihaknya diterima Asisten Sekretaris Daerah (Ass Sekda) Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs Tri Saktiyana MSI,

Jumat (20/8). "Kami juga meminta agar objek pariwisata dibuka dengan menerapkan prokes yang ketat. Objek pariwisata dibuka, secara tidak langsung ekonomi masyarakat bisa berputar kembali," terangnya.

Terkait vaksinasi, Dani menyatakan buruh berhak menolak. "Bukan berarti tidak mau, namun karena kami belum tahu kejelasan vaksin tersebut. Juga dalam penyaluran bantuan sosial data harus valid," tegasnya.

Sementara Tri Saktiyana menjelaskan, prinsipnya Pemda DIY selalu mengevaluasi PPKM setiap minggunya terkait naik turunnya angka penularan dan penyebaran Covid-19. "PPKM memang memberatkan masyarakat karena di DIY pariwisata sektor penggerak dan penguat utama perekonomian," ujarnya. (Vin)-f

BANK BPD DIY SYARIAH - LP MA'ARIF

Tingkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan

YOGYA (KR) - Guna mendukung pemerintah dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat di DIY, Bank BPD DIY Syariah mensosialisasikan literasi dan inklusi keuangan bagi lembaga pendidikan di lingkungan Perguruan Ma'arif. Acara tersebut digelar Sabtu (21/8), bersamaan Rapat Kerja LP Ma'arif NU Sleman bertempat di SMK 2 Ma'arif.

Ketua LP Ma'arif NU Sleman Drs H Murdiyanta mengatakan, lewat rapat kerja itu diharapkan dapat membawa Ma'arif Sleman lebih meningkatkan kapasitas dalam segala hal. Khususnya dalam kepengurusan yang dibagi menjadi 6 bidang. Yaitu bidang sarana prasarana, bidang GTK, bidang ke-siswaan, bidang humas dan kerja sama, bidang penjaminan mutu, dan bidang penelitian dan Pengembangan. "Komunikasi dan sinergi antar bidang menjadi kunci sukses keberhasilan program kerja yang telah dirintis," ujarnya.

Sementara itu Pemimpin



KR-Istimewa

Peserta saat mengikuti sosialisasi Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Lembaga Pendidikan di lingkungan Perguruan Ma'arif.

Bank BPD DIY Syariah Cabang Pembantu UII, Ihsan Muhammad menyampaikan, sosialisasi yang digelar sejalan dengan upaya pemerintah yang menargetkan tingkat inklusi keuangan Indonesia sebesar 90 persen pada tahun 2024. Hal itu seiring dengan program 1 Rekening 1 Pelajar (Kejar) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Inklusi keuangan adalah pemenuhan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam

rangka memperkuat kesejahteraan. "Inklusi keuangan dapat terwujud jika seluruh orang dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan berkurangnya kemiskinan serta kesenjangan ekonomi. Untuk itu Bank BPD DIY mengajak untuk membudayakan menabung sejak dini bagi siswa-siswa setingkat MI, MTs dan MA di lingkungan LP Ma'arif," terangnya. Ihsan Muhammad me-

nambahkan, digitalisasi bukan sebuah keniscayaan dan merambah dunia pendidikan. Bank BPD DIY Syariah siap mendukung transaksi secara digital di lingkungan LP Ma'arif dengan produk unggulan Bank BPD DIY seperti Cash Management System (CMS) maupun Qris Ultimate Automated Transaction (QUAT).

Sedangkan Achmad Fauzi MSI selaku Wakil Ketua Bidang Tanfidziyah LP Ma'arif NU mengungkapkan, kegiatan tersebut menjadi momentum kebangkitan LP Ma'arif NU. Lewat kegiatan itu diharapkan bisa menjadi motor penggerak lembaga pendidikan Ma'arif NU dan lembaga pendidikan lainnya.

"Langkah-langkah konkrit yang dapat dilakukan LP Ma'arif NU Sleman sebagai perwujudan semangat untuk berkembang. Salah satunya memanfaatkan kemitraan dengan perbankan seperti Bank BPD DIY Syariah untuk transparansi dan integritas keuangan," terangnya. (Ria)-f

BANTUAN KELUARGA SANGAT PENTING

Capaian Vaksinasi Disabilitas Akan Dievaluasi

YOGYA (KR) - Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi disabilitas terus dilakukan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dapat mengganggu upaya memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit Covid-19. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, drg Emma Rahmi Aryani MM kepada KR, Minggu (22/8) terkait progres pelaksanaan vaksinasi bagi kaum difabel.

Menurut drg Emma, sosialisasi mengenai vaksinasi terhadap kaum difabel ini telah gencar dilakukan. Jika nantinya belum mencapai target, maka upaya agar semakin banyak kaum defabel divaksinasi terus dilakukan. Sejumlah alasan kelompok disabilitas perlu divaksinasi, yakni selain

berisiko terpapar Covid-19, dapat memperparah sakitnya jika terpapar Covid-19 dan juga berisiko mengalami masalah kesehatan yang baru. "Apa yang harus dilakukan kepada mereka, yakni disiplin dalam penegakan protokol kesehatan dan terus meningkatkan imunitas dengan makan bergizi, istirahat cukup dan aktivitas fisik," jelasnya.

Sejauh ini pelaksanaan vaksinasi dilakukan di masing-masing Puskesmas. Misalnya di Puskesmas Umbulharjo 1, ada laporan 50 difabel telah divaksin pada jadwal yang sudah ditetapkan. Bagi yang tidak bisa datang, karena adanya kendala transportasi dan sebab lainnya, bisa diijinkan pulang.

"Nanti tinggal kita evaluasi, dari capaian. Kalau masih belum memenuhi

target akan kita cari cara agar target tercapai. Dan kalau perlu melakukan pendekatan layanan kepada mereka," ujar drg Emma.

Sejauh ini dari laporan yang masuk, bagi yang tidak mau datang ke tempat vaksinasi, karena berhalangan. Selain itu ada yang menganggap merepotkan dan merasa diayak-ayak ikut vaksin. Padahal mereka sudah dikunjungi survelen kelurahan dan faktor lainnya.

"Bantuan dari pihak keluarga atau orang terdekat sangat penting. Apalagi adanya kondisi disabilitas mental yang tidak terkontrol dan tidak bisa komunikasi. Jika mengalami kendala transportasi, sebetulnya ada solusi karena kita kerjasama dengan Sigap," ujar drg Emma. (Jon)-f

Serdik Sespimmen Polri Dikreg ke-61 Peduli Penanggulangan Covid 19



KR-Istimewa

Penyerahan secara langsung donasi untuk mendukung penanganan Covid-19.

YOGYA (KR) - Peserta Didik (Serdik) Sekolah Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-61, Ma-

yor Pom Yohannes Hapsoro Pamungkas SH, memberikan donasi dana kepada masyarakat padukuhan Kepuh

Mulyodadi Bambanglipuro Bantul. Donasi itu untuk mendukung pengadaan APD bagi relawan padukuhan setempat dalam penanganan pemulasaran dan pemakanan dengan standar Covid 19.

Bantuan diterima langsung oleh Bapak Acep Diyantoro SE, selaku Kepala Padukuhan Kepuh Mulyodadi disaksikan oleh perwakilan warga. Diharapkan dengan bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi para relawan yang bertugas dan khususnya bagi masyarakat Kepuh Mulyodadi. (*)-f